

PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN LIMBA B MELALUI PEREMAJAAN (*RENEWAL*)

Heryati¹

Intisari

Peremajaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan harkat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dilakukan melalui penataan dan perbaikan kualitas yang lebih menyeluruh terhadap kawasan hunian yang sangat kumuh.

Metode yang digunakan adalah dengan Metode Penelitian Lapangan (*Field Research Methode*) dan metode penelitian kepustakaan (*Library Research Methode*). Pengamatan lapangan langsung pada lokasi untuk melihat kondisi fisik sedang Metode Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur yang terkait dengan penanganan kawasan kumuh untuk memperoleh alternatif penanganan sesuai dengan karakteristik fisik lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan permukiman kumuh di Lingkungan I kelurahan Limba B dapat dilakukan dengan melalui peremajaan dengan cara konsolidasi lahan melalui penataan ulang dan pembagian parsil kapling kembali setelah disisihkan lahan untuk prasarana dan sarana (jalan, ruang terbuka hijau, taman usaha dan bangunan koperasi), dimana bentuk penanganan yang dilakukan adalah menggunakan pembangunan perumahan sebagai *entry point* untuk pengembangan kemampuan usaha ekonomi masyarakat, melalui penyediaan ruang usaha pada bangunan rumah yang baru.

Kata Kunci: Peremajaan, permukiman kumuh, penanganan

Abstract

Renewal is activity to increase prosperity and public valence is having production low (MBR) what done through settlement and refinement of grade which more totally to a real dwelling area slump.

Method applied is with Field Research Methode and Library Research Methode. Observation of direct field at location to see condition of physical and Field Research Methode is done by the way of reading literatures related to handling of slump area to obtain alternative of handling as according to characteristic physical of area.

Result of research indicates that dirty settlement handling in are I sub-district of Limba B can be done through renewal by the way of consolidation of land through re- settlement and division of parsil plot of land returns after put aside by land for infrastructure and supporting facilities (road/street, green open scape, park effort and co-operation building), where form of handling done is apply development of housing as entry point for performance expansion of effort for public economics, through supply of space effort for at new housing building.

Keyword: Renewal, settlement of slump, handling

PENDAHULUAN

Pengadaan perumahan merupakan suatu alternatif bagi pemecahan masalah kebutuhan perumahan yang kerap kali timbul menyertai perkembangan suatu kota. Pola pengadaan perumahan dalam memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan, baik

¹ Dosen Jurusan Teknik Arsitektur, FT-Universitas Negeri Gorontalo

dengan pola pembangunan baru (*New Construction*) maupun dengan cara meremajakan suatu lingkungan perumahan yang telah dikembangkan/terbangun (*renewel*). Pada pola pembangunan baru (*new construction*) umumnya suatu pengadaan perumahan dilakukan dengan pola sebelumnya. Sedangkan pada pola *renewel*, pengadaan perumahan dilakukan tetap di atas areal/lahan yang telah berkembang/terbangun.

Permasalahan permukiman kumuh merupakan suatu permasalahan penanganan permukiman yang erat kaitannya dengan sisi pengadaan perumahan untuk masyarakat ekonomi lemah yang selalu timbul dalam kota-kota yang berkembang..

Beberapa program telah dilaksanakan oleh pemerintah kota Gorontalo untuk menangani permukiman kumuh di Kelurahan Limba B diantaranya program dana bergulir berupa bantuan dana untuk perbaikan rumah dan batuan dana untuk modal usaha. Sejauh ini pengaruh yang ditimbulkan oleh program itu belum dapat memperbaiki kondisi yang ada. Ini disebabkan kurang memahami permasalahan yang ada sebagai karakteristik pembentuk kekumuhan, dan penanganan yang dilakukan hanya secara parsial sehingga belum juga tuntas program yang satu akan muncul masalah yang lain. Sehingga penanganan yang dilaksanakan belum dapat memecahkan masalah secara signifikan.

Penanganan permukiman dengan peremajaan sebagai bagian dari suatu proses pengadaan perumahan hampir jarang dilirik sebagai suatu alternatif dalam pengadaan. Ironisnya, permukiman kumuh justru merupakan suatu masalah perumahan yang selalu ada di setiap kota dalam jumlah yang cukup besar dan telah siap menunggu untuk segera ditangani, mengingat kelompok sasarannya (*target group*) yang jelas dan telah ada

Berbeda dengan pola pembangunan baru dimana pembangunan perumahan lebih disertai atau dimulai oleh kehendak/inisiatif para pelaku (kelompok sasaran yang terlibat), pada peremajaan permukiman kumuh di samping terdapat keinginan masyarakat sebagai pelaku yang akan terlibat langsung, juga terdapat kepentingan dari pelaku lain yang justru sering kali berbenturan dan berbeda dengan kepentingan dan maksud kebutuhan dari masyarakat yang mendiami permukiman tersebut. Oleh karena itu studi akan dilakukan untuk meminimalkan permasalahan yang dikhawatirkan akan muncul dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemukiman kumuh adalah lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak huni, ciri-cirinya antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya (Budiharjo: 1997).

Menurut Undang-undang RI No 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, peremajaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan harkat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dilakukan melalui penataan dan perbaikan kualitas yang lebih menyeluruh terhadap kawasan hunian yang sangat kumuh.

Tipologi permukiman kumuh perlu didudukkan sebagai suatu batas awal dalam melakukan penanganan permukiman kumuh melalui peremajaan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan peran dan kerjasama antara pelaku serta pola kontribusi tiap pelaku yang akan dilakukan untuk masing-masing tipe. Menurut Hendrianto (1992) perbedaan yang mendasari tipologi permukiman kumuh adalah dari status kepemilikan tanah dan Nilai Ekonomi Lokasi (NEL).

Status kepemilikan lahan dari suatu kawasan diremajakan akan sangat mempengaruhi bentuk penanganan dan seberapa jauh tingkat keterlibatan dari masing-masing pelaku peremajaan dalam konteks kemitraan (DPU Dirjen Cipta Karya, 2006). Secara umum berdasarkan status kepemilikan tanah dapat dibedakan dalam 2 status yakni kawasan dengan dominasi tanah negara dan kawasan dengan dominasi tanah milik.

Pada lahan dengan status tanah milik negara umumnya peran pemerintah dalam mengembangkan kawasan tersebut lebih besar dari pelaku lainnya. Demikian sebaliknya pada kawasan dengan status tanah milik masyarakat, umumnya peran masyarakat dalam membiayai pendanaan menjadi lebih dominan.

Faktor lain yang membedakan penanganan dalam peremajaan adalah nilai ekonomi lokasi, yang meliputi; kawasan dengan nilai ekonomi tinggi dan kawasan dengan nilai ekonomi lemah

Kedua faktor di atas, yaitu status kepemilikan tanah dan nilai ekonomi lokasi selanjutnya akan membedakan kontribusi pendanaan, sifat kelembagaan dan posisi dominan pelaku peremajaan dalam konteks kemitraan.

CARA PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Limba B dengan fokus pengamatan pada lokasi dengan tingkat kekumuhan tertinggi yakni lingkungan 1 RT 02/RW02 (Heryati: 2008).

Metode pengumpulan data dilakukan dengan Metode Penelitian Lapangan (*Field Research Methode*) dan metode penelitian kepustakaan (*Library Research Methode*). Pengamatan lapangan langsung pada lokasi untuk melihat kondisi fisik sedang Metode Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur yang terkait dengan penanganan kawasan kumuh untuk memperoleh alternatif penanganan sesuai dengan karakteristik fisik lingkungan.

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif dengan memberikan gambaran terhadap lokasi melalui identifikasi terhadap variabel-variabel antara lain: kondisi sarana dan prasarana (jalan, saluran, kondisi rumah, kepadatan bangunan, dll) baik secara kualitas maupun kuantitas, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan aspek-aspek penentu penanganan berupa Nilai Ekonomi Lokasi dan Status Kepemilikan Lahan. Selanjutnya dari hasil analisis diperoleh karakteristik permukiman untuk kemudian dicari konsep peremajaan yang sesuai dengan karakteristik lokasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Lingkungan Permukiman di Lokasi Peremajaan

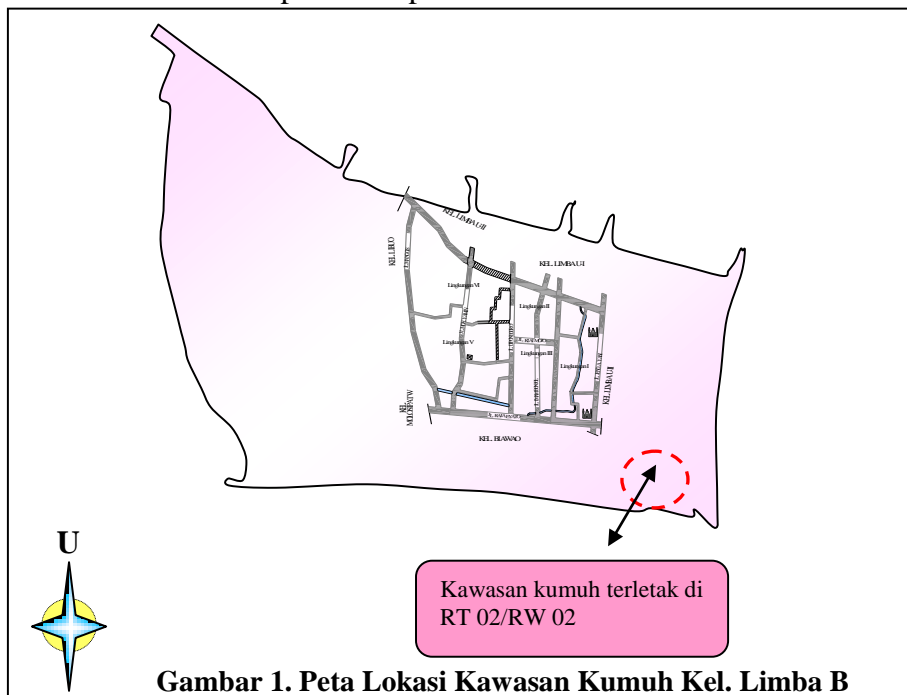
Areal peremajaan dilakukan pada lingkungan I dimana merupakan areal terkumuh di Kelurahan Limba B (Heryati; 2008), dengan karakteristik sebagai berikut:

- Lingkungan permukiman berada pada peruntukan lahan yang sesuai dengan rencana peruntukannya sebagai fungsi permukiman.
- Kepadatan bangunan tinggi terutama pada RT 02/RW 02 terdiri dari 12 rumah menempati lahan seluas 800 m² dengan jumlah penduduk 102 jiwa.
- Kondisi bangunan sebagian besar non permanen yang tidak memenuhi syarat kesehatan baik dari segi pencahayaan maupun penghawaan ditambah lagi dengan

kepadatan penghuni/rumah rata-rata 8-9 orang/rumah dengan luasan yang sangat sempit .

- Sebagian besar penduduk adalah pekerja informal dengan kemampuan ekonomi rendah < Rp. 200.000.
- Kondisi prasarana dan infrastruktur yang buruk secara kualitas dan kuantitas.
- Rendahnya kualitas lingkungan permukiman terutama pada daerah seputar saluran pembuangan/drainase yang diakibatkan selain karena pendangkalan juga digunakan sebagai tempat pembuangan sampah bahkan pada beberapa titik di atasnya dibuat bangunan darurat sebagai tempat tinggal dan tempat BAB.
- Saluran pembuangan air limbah rumah tangga sebagian besar belum terbangun sehingga pembuangannya dengan cara membuang ke halaman sehingga menimbulkan bau dan jorok yang bisa mengganggu kesehatan dan sebagian lagi membuang ke saluran bagi hunian yang berada di atas saluran.
- Merupakan daerah langganan banjir sekalipun dengan intensitas hujan yang rendah, akibat saluran drainase yang tidak berfungsi.

Lokasi kawasan kumuh untuk kelurahan Limba B yang dipetakan dalam Peta Administrasi Kelurahan dapat dilihat pada Gambar 1.



Permasalahan

Keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat dikaitkan dengan ketidakmampuan untuk memanfaatkan keuntungan/potensi lokasi serta keterbatasan lahan yang tersedia, mengakibatkan bentuk pembangunan yang sporadis dan di bawah standar.

Potensi

- Kebijakan pemerintah kota Gorontalo untuk melakukan penataan permukiman kumuh baik yang berada pada pusat kota, maupun daerah pinggiran (sepanjang bantaran danau dan pantai).
- Kedekatan dengan pusat kota sehingga nilai lahan memiliki nilai ekonomi tinggi.
- Tingginya kesempatan menciptakan kegiatan ekonomi/usaha rumah tangga pendukung aktifitas kota untuk dikembangkan di dalam lingkungan tersebut.
- Kondisi bangunan yang semi permanen, memudahkan untuk dilakukan pembangunan kembali bangunan rumah dan lingkungannya.
- Kelompok sasarannya jelas karena terkonsentrasi pada lingkungan I

Tipologi Peremajaan

Berdasarkan karakteristik permukiman maka peremajaan permukiman kumuh di Kelurahan Limba B merupakan salah satu kasus penanganan peremajaan dengan menggunakan pendekatan **Pembangunan yang Bertumpu pada Masyarakat (PBPM)**. Tipologi peremajaan pada kasus ini adalah peremajaan yang dilakukan di atas tanah yang didominasi milik masyarakat dengan nilai ekonomi lokasi yang sangat tinggi (strategis).

Bentuk Penanganan

Berdasarkan pertimbangan kondisi, permasalahan dan potensi pengembangan lingkungan permukiman yang optimal maka penanganan permukiman kumuh di Lingkungan I kelurahan Limba B diarahkan kembali pada pembangunan permukiman

murni melalui pembangunan kembali (*redevelopment*) bangunan rumah dan prasarana lingkungannya di atas lahan yang telah ditempati (lahan asal). Penanganan dilakukan dengan konsolidasi lahan melalui penataan ulang dan pembagian parsil kapling kembali setelah disisihkan lahan untuk prasarana dan sarana (jalan, ruang terbuka hijau, taman usaha dan bangunan koperasi).

Suatu hal terpenting dari bentuk penanganan yang dilakukan adalah menggunakan pembangunan perumahan sebagai *entry point* untuk pengembangan kemampuan usaha ekonomi masyarakat, melalui penyediaan ruang usaha pada bangunan rumah yang baru.

Prinsip Dasar Penanganan

- Mendudukan fungsi pemerintah sebagai pemampu (*enabler*) dalam konteks pengadaan perumahan, dengan demikian masyarakat didudukan sebagai subjek pembangunan;
- Tanpa mengusur/merelokasi;
- Berdasarkan kemampuan masyarakat;
- Penerapan subsidi silang untuk memampukan masyarakat dalam pengadaan rumah sendiri melalui penggalangan sumber daya dari seluruh pelaku terlibat;
- Efisiensi distribusi lahan; memastikan efisiensi penggunaan lahan serta pola jaringan infrastruktur, dan menjamin hak kepemilikan tanah bagi masyarakat;
- Orientasi pada kemampuan keberlanjutan program oleh masyarakat dan kemampuan pereplikasian dalam skala kota.

Output Penanganan Permukiman Kumuh

Fisik

- Terbangunnya rumah-rumah milik masyarakat dengan bentuk 2 (dua) lantai dalam 2 type: Lb 36 m² jumlah unit 20, dengan peruntukkan lantai atas untuk tempat tinggal dan lantai bawah sebagai ruang usaha (disewakan sebagai tempat tinggal atau digunakan sebagai ruang usaha rumah tangga/warung).
- Terbangunnya rumah sewa pemerintah di atas tanah negara sebagai pensubsidi kegiatan ekonomi lingkungan dalam mekanisme pendanaan bergulir kawasan.

- Terbangunnya taman usaha bersama sebagai sarana pengembangan usaha masyarakat.
- Pengadaan prasarana lingkungan.

Non Fisik

- Pola kelembagaan pembangunan perumahan di dalam lingkungan I Kelurahan Limba B.
- Mekanisme pendanaan pengadaan perumahan melalui mekanisme dana bergulir.
- Pelembagaan bentuk koordinasi penanganan permukiman kumuh.

Tahapan Pembentukan Kemitraan

a. Sosialisasi Program Peremajaan

Tahap ini merupakan tahap sosialisasi kepada seluruh pelaku peremajaan mengenai bentuk-bentuk pendekatan baru yang akan diterapkan.

Sosialisasi pola pendekatan Pembangunan Bertumpu Pada Masyarakat (PBPM) adalah adanya konsekuensi pelibatan aktif dan pemberdayaan kemampuan masyarakat dalam proses pengambilan kesepakatan, sedangkan bagi Pemerintah Daerah penekanan lebih kepada adanya pendekatan penyusunan program yang akan diusulkan bersama-sama masyarakat dan pelaksanaan program yang tidak semata-mata berorientasi pada proyek (*project orientied*). Bentuk sosialisasi program dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan *workshop*.

b. Penerapan Pola Kemitraan dalam Proses Belajar Praktis

Tahap ini merupakan ajang melembagakan pola dan mekanisme kemitraan yang telah disepakati dan dibentuk pada awal penanganan melalui pelibatan praktis seluruh pelaku dalam proses perencanaan partisipatif, penggalangan komunitas peremajaan, proses membangun bersama dan evaluasi bersama. Pada setiap kegiatan tersebut selalu diakhiri dengan bentuk-bentuk kesepakatan tentang peran pelaku dan distribusi porsi pengorbanan yang dilakukan oleh setiap pelaku.

Pola Kemitraan dalam Peremajaan Lingkungan I Kelurahan Limba B

Dengan terdapatnya perbedaan kepentingan dan prosedur yang harus ditempuh selama proses peremajaan/penanganan, dibutuhkan suatu sikap bahkan mengarah kepada suatu inovasi untuk memecahkan/memutus permasalahan yang selalu disertai oleh bentuk pengorbanan/resiko dari setiap pelaku yang paling berkompeten. Dari hal tersebut terlihat bahwa kemitraan juga mengandung konsekuensi dalam bentuk pembagian resiko (*risk sharing*) pada setiap pelaku, disamping bentuk-bentuk penggalangan sumber daya yang biasa dilakukan.

Pola pembangunan perumahan yang dilakukan dalam peremajaan ini adalah penggalangan semaksimal mungkin peran dan fungsi para pelaku sebagai berikut:

- Pembangunan rumah dilakukan secara swadaya oleh masyarakat melalui fasilitas pinjaman dana pembangunan rumah BTN, yang dinamakan “Kredit Triguna”.
- Pengadaan lahan oleh masyarakat, dengan melakukan konsolidasi lahan dihasilkan parsil-parsil baru sesuai dengan proporsi awal.
- Peningkatan status lahan melalui proses sertifikasi oleh pihak BPN, melalui program Proda.
- Penyisihan sebagian lahan oleh masyarakat untuk ruang infrastruktur (jalan, ruang terbuka).
- Pengadaan dan pembangunan infrastruktur lingkungan oleh pemerintah pusat, daerah, dan instansi terkait (DPU-CK).
- BKM bertindak sebagai wakil masyarakat dalam melaksanakan pembangunan fisik perumahan dan sebagian prasarana lingkungan.
- Pemberian dukungan dalam bentuk pinjaman institusi (*institutional guarantee*) dalam mendukung proses mekanisme dana penjematan pembangunan rumah (*bridging fund*) dan mekanisme dana bergulir.
- Konsultan Pembangunan bertindak sebagai perantara/mediator yang berfungsi menjembatani dan mensinkronisasikan seluruh kebutuhan pelaku peremajaan.

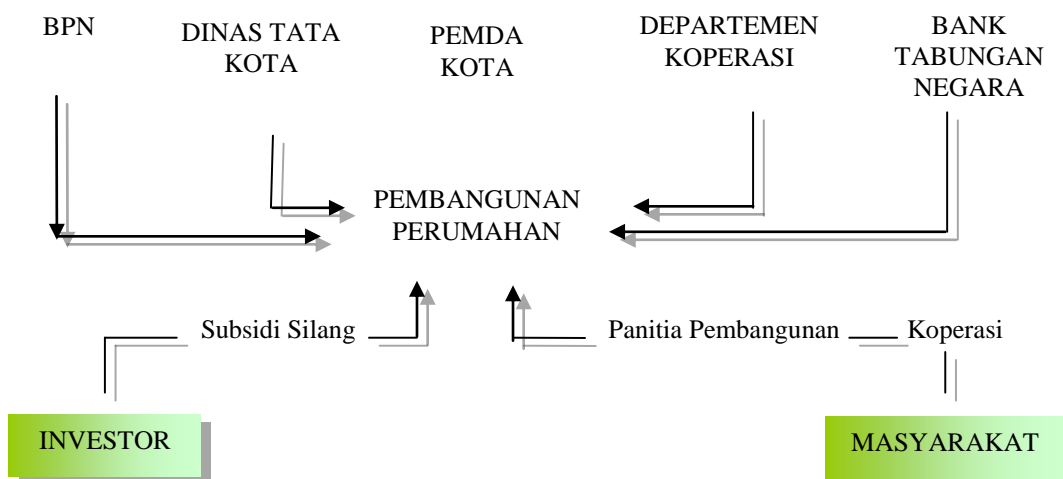
Kemitraan dalam Pendanaan Peremajaan

Penggalangan Sumber Dana

Prinsip dasar dari kemitraan dalam pendanaan adalah melakukan penggalangan sumber dana dan membagi beban pendanaan kepada setiap pelaku yang terlibat. Penggalangan sumber dana yang dilakukan secara langsung (dalam bentuk bantuan dana langsung) maupun tidak langsung seperti pemberian kemudahan dalam prosedur dan perijinan serta pelibatan program-program tertentu (seperti Proda BPN untuk sertifikasi), membentuk suatu mekanisme subsidi silang yang mengakibatkan rendahnya biaya pembangunan rumah yang harus dipikul oleh setiap pelaku terutama masyarakat

Penggalangan sumber dana juga memberikan inovasi dalam pelibatan swasta untuk berperan dalam membiayai suatu pengadaan perumahan melalui penggalangan dana sosial yang akan digunakan sebagai sumber dana bergulir.

Prinsip lain adalah mengarahkan penggeseran dominasi pendanaan infrastruktur yang bersifat lingkungan kepada masyarakat setempat. Hal ini dilakukan dengan memberikan beberapa kesempatan usaha kepada masyarakat melalui pengelolaan rumah sewa pemerintah untuk digunakan sebagai sumber dana perbaikan dan pemeliharaan prasarana lingkungan.



Gambar 2. Sumber Daya dan Dukungan Program Perumahan

Tabel 1. Bentuk Kemitraan dalam Penggalangan pendanaan

SUMBER	PERUNTUKAN
PEMERINTAH <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • PEMDA (APBD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan Teknis (Perencanaan dll.) • Pengadaan Prasarana Dasar
PROGRAM-PROGRAM <ul style="list-style-type: none"> • KUDP • KIP • PSD-CK 	<ul style="list-style-type: none"> • Komponen Penanganan • Pengadaan Prasarana Dasar
INSTANSI BERWEWNANG <ul style="list-style-type: none"> • PLN • PDAM 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Infrastruktur
BPN <ul style="list-style-type: none"> • PRODA 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Status Lahan
PROGRAM NON TEKNIS <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sumber daya manusia • Pengembangan kesempatan usaha
MASYARAKAT <ul style="list-style-type: none"> • Swadana 	Pengadaan Rumah
SWASTA	Sumber modal Dana Bergulir
BANK	Kredit pinjaman pengembangan rumah

Kemitraan dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik

Kemitraan dalam pembangunan fisik dilakukan dengan pembagian peran antar pelaku dalam penggalangan sumberdaya sesuai dengan kompetensi masing-masing pelaku. Beberapa prinsip kemitraan dalam pembangunan fisik:

- Memberikan porsi pelaksanaan pembangunan fisik melalui pengalihan sebagian pelaksanaan konstruksi prasarana lingkungan kepada masyarakat (BKM) sesuai dengan kapasitasnya. Dari 100% pembangunan fisik 40% dilaksanakan oleh BKM melalui media kerja sama operasional (KSO) antara pihak DPU Cipta Karya dengan BKM.
- Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dana penjemputan (*bridging fund*) dalam konstruksi bangunan rumah, melalui panitia pembangunan masyarakat.

- Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mengusulkan dan menyepakati bentuk dan jenis komponen fisik yang akan dibangun dalam suatu proses implementasi fisik prasarana, mulai dari perencanaan (termasuk penentuan lokasi komponen), pelaksanaan konstruksi hingga pengawasan pelaksanaan pembangunannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan karakteristik dan tipologi permukiman di Lingkungan I Kelurahan Limba B yang mana kawasan dengan status tanah didominasi oleh tanah milik masyarakat dan memiliki nilai ekonomi lokasi yang tinggi sehingga penanganan perumahan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan **Pembangunan yang Bertumpu pada Masyarakat (PBPM)**.

Bentuk penanganan yang dilakukan adalah menggunakan pembangunan perumahan sebagai *entry point* untuk pengembangan kemampuan usaha ekonomi masyarakat, melalui penyediaan ruang usaha pada bangunan rumah yang baru, dimana wujud Fisik berupa rumah-rumah milik masyarakat dengan bentuk 2 (dua) lantai dalam 2 type: Lb 36 m² jumlah unit 20, dengan peruntukkan lantai atas untuk tempat tinggal dan lantai bawah sebagai ruang usaha (disewakan sebagai tempat tinggal atau digunakan sebagai ruang usaha rumah tangga/warung), terbangunnya rumah sewa pemerintah di atas tanah negara sebagai pensubsidi kegiatan ekonomi lingkungan dalam mekanisme pendanaan bergulir kawasan, terbangunnya taman usaha bersama sebagai sarana pengembangan usaha masyarakat, pengadaan prasarana lingkungan. Sedang wujud Non Fisik berupa pembentukan pola kemitraan/kelembagaan dan mekanisme pendanaan sebagai bentuk koordinasi penanganan permukiman kumuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharjo, Eko. 1997. *Sejumlah Masalah Permukiman Perkotaan*. Bandung: Alumni.
- Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal. 2006. *Panduan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kota*. Dirjen Cipta Karya.
- Hendrianto. 1997. Model Pembangunan Perumahan dalam peremajaan Permukiman Kumuh.
- Heryati. 2008. *Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Kota Gorontalo*. Makalah disajikan dalam Seminar hasil Identifikasi Lokasi dan Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo, Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Gorontalo 6 Januari.
- Sastra, S. Marlin, E. 2005. *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*. Yogyakarta: Andi
- Undang-undang RI No 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.

